

Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Kimia Analis Bogor)

Accounting Internal
System

Bambang Pamungkas dan Ina Wardani Latifah
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia
E-Mail: pamungkas62@yahoo.com

117

Submitted:
JUNI 2013

Accepted:
JULI 2013

ABSTRACT

Law No. 17/ 2003 on State Finance requires form and content of accountability report of APBN/ APBD implementation must be arranged and presented in accordance with governmental accounting standard set by government regulation. Law No. 17/ 2003 is on State Finance and law No. 1/ 2004 on Government Treasury. Accounting Institution System is a series of manual and computerized procedures starting from data collection, recording, abstracting, financial position reporting and financial operations at the ministry/ institution. Institution Accounting System (SAI) consists of Financial Accounting System (SAK) and Management Accounting System of State-owned Assets (SIMAK-BMN).

Analyzing the procedures of Institution Accounting System (SAI) is important in the process of composing financial statements for the purpose of financial accountability comprising Budget Realization Report, Balance Sheet, Note of Financial Statement and Management of State-owned Assets (BMN). Institution Accounting System (SAI) plays an important role in composing financial reports at Bogor Chemistry Analyst High School (SMAKBO) located in Jalan Binamarga I Ciheuleut, Baranangsing, Bogor Timur. It's very influential in composing financial statements as well because each report received always use Institution Accounting System (SAI) from the beginning of expenditure process until the data is entered into the Institution Accounting System (SAI).

The purpose of this analysis is to determine how is the human resources that run the Institution Accounting System and to find out the implementation procedure of the Accounting System of Budget Users Authorization Unit and also the integration procedures of the accounting system of Budget Users Authorization Unit to Institution Accounting System (SAI). The result of the analysis of financial statement is that the procedure implemented by SMAKBO has been in accordance with the existing regulations, so that producing good and accountable financial reports.

After the definition of each component of Institution Accounting System and Financial Statement has been known, It can be concluded that in carrying out procedure and financial statement reporting it should be in accordance with the prevailing regulation and should be on time in order to yield good financial statement. And in fact, the Institution Accounting System (SAI) at Bogor Chemistry Analyst High School (SMAKBO) has been applied well, and it needs to be maintained.

Keywords: Institution accounting System (SAI); Financial Statement

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga.

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 1 No. 2, 2013
pg. 117-128
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

Berdasarkan pasal 55 ayat 2 UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Laporan Keuangan dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi (SAI), yang terdiri dari sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN).

Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga. Kementerian/ lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (SMAKBO) merupakan unit satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Perindustrian R.I termasuk ke dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri sesuai dengan SK Menteri Perindustrian Nomor 234/M/SK/6/85 tanggal 24 Juni 1985. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan berjalan lebih optimal bila sekolah dilakukan kegiatan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki beberapa substansi, yaitu administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi kepegawain, administrasi perlengkapan, dan administrasi keuangan. Penelitian ini membahas administrasi keuangan di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (SMAKBO) berkaitan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah : (1) apakah sumber daya manusia di SMAKBO telah menjalankan sistem akuntansi unit kuasa pengguna anggaran (UAKPA) dengan baik? (2) bagaimana prosedur pelaksanaan sistem akuntansi unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (SA-UAKPA) di SMAKBO? (3) bagaimana prosedur integrasi sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (SA-UAKPA) ke dalam sistem akuntansi instansi (SAI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui bagaimana sumber daya manusia di SMAKBO dalam menjalankan sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna anggaran (SA-UAKPA) (2) mengetahui prosedur pelaksanaan sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna anggaran (SA-UAKPA) di SMAKBO (3) mengetahui prosedur integrasi sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (SA-UAKPA) ke dalam sistem akuntansi instansi (SAI).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan.

Menurut Deddi Nordiawan dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2006:1) menyatakan bahwa "Organisasi Sektor Publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri". Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hastoni dan Iriyadi dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2007) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber dan yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai di perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging of services*).

Sistem Akuntansi

Menurut Soemarso (2004 : 3) akuntansi adalah: proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Operasi suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahapan:

- 1) Harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan, baik mengenai jumlah fisik maupun jumlah rupiahnya, serta data penting lainnya yang berkaitan dengan transaksi perusahaan.
- 2) Harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi kedalam catatan-catatan akuntansi.
- 3) Harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-catatan akuntansi menjadi laporan untuk manajemen dan pihak lain yang berkepentingan.

Sistem Akuntansi Instansi

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No: 21/M-IND/PER/5/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Departemen Perindustrian. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual dan atau terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Departemen Perindustrian. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:4), Sistem Akuntansi Instansi adalah: serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan melaporkan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. SAI terdiri dari Sistem

Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi (SAK) terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA);
- b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SAUAPPA-W);
- c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SAUAPPA-E1); dan
- d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA).

Untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB).

Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga;
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) yang berada pada tingkat Eselon 1;
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat wilayah; dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja.

Unit Akuntansi Barang, terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga;
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat eselon 1;
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah; dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja.

Pada tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga dapat menunjuk satuan kerja sebagai koordinator UAPPA-W/UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja lingkup eselon I dari sebuah kementerian negara/lembaga sebagai UAPPA-W/UAPPB-W sesuai struktur kementerian negara/lembaga.

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan merupakan bagian SAI yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. Dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 21/M-IND/PER/5/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Departemen Perindustrian. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sub sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah sumber dokumen dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SAK dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Perdirjen Nomor Per 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan SAK kementerian negara/lembaga membentuk dan menunjuk unit akuntansi di dalam organisasinya, yang terdiri dari :

- UAPA pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga;
- UAPPA-E1 pada tingkat Eselon I;
- UAPPA-W pada tingkat wilayah;
- UAKPA pada tingkat satuan kerja.

Kementerian negara/lembaga yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, disamping wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya sendiri, juga wajib menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara terpisah.

Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya (asas desentralisasi). Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi manajemen barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dikompilasi.

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ridwan S. Sundjaya & Inge Barlian, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut. Mengacu pada definisi Ensiklopedia, Laporan Keuangan adalah sekumpulan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disajikan dalam bentuk laporan sistematis yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan.

Menurut Sundjaya dan Barlian (2001 : 47), Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai sumber data, terdiri dari faktur-faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan bank dan sebagainya. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi.

Tujuan Umum Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif.

Dalam kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dijelaskan mengenai tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan laporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

International Federation of Accounting Public Sector Committee (IFAC PSC) mengeluarkan *IFAC PSC Study 1* tentang *Financial Reporting by National Governments* (2000), yang menjelaskan mengenai tujuan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atau unit kerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Manfaat Penyajian Laporan Keuangan

Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitas;
- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;

- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - a. menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit yang lain;
 - b. untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di dalam pemerintahan;
 - c. untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
 - d. untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).

Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Laporan keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan tehnik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki beberapa karakteristik yang berbeda kedua sektor juga memiliki persamaan yaitu kedua-duanya membutuhkan standar akun keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan yaitu laporan keuangan pemerintah memakai *cash accounting* dan laporan keuangan sektor swasta memakai *accrual accounting*. Maka perbedaan Laporan Keuangan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1
Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

No.	Laporan Keuangan Pemerintah	Laporan Keuangan Sektor Swasta
1.	Fokus Finansial dan Politik.	Fokus Finansial
2.	Kinerja diukur secara financial dan non finansial	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
3.	Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat.	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
4.	Laporan diperiksa oleh <i>Treasury</i> independent.	Laporan keuangan diperiksa oleh auditor.

Jenis Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan APBN setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok terdiri atas :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Unsur-unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Pembiayaan

2) Neraca (*Balance Sheet*)

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3) Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statements*)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga, informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro ini tidak harus diungkapkan;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan;
- d. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi;
- e. Informasi rinci tentang pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disajikan dalam LRA, pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca, dan pos-pos arus kas masuk dan keluar yang disajikan dalam LAK;
- f. Kejadian penting setelah tanggal pelaporan;
- g. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*).

Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran APBN, di mana dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per tanggal 31 Desember untuk neraca, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember untuk laporan arus kas dan laporan realisasi anggaran.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

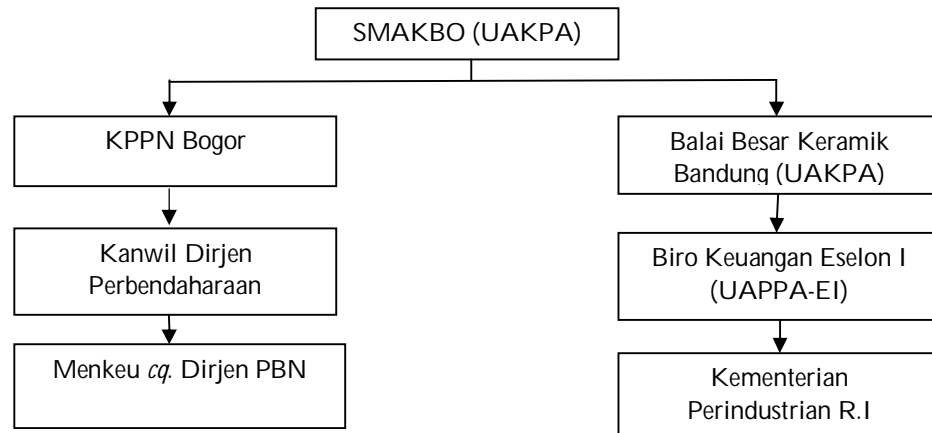
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (SMAKBO). Metode penelitian yang akan digunakan adalah: (1) Riset Kepustakaan dan (2) Riset Lapangan. Klasifikasi variabel penelitian dimasukkan dalam kelompok : variabel independen dan variabel dependen. Sumber data berasal dari : (1) data primer dan data sekunder, melalui : (1) penelitian kepustakaan dan (2) penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) wawancara dan (2) peninjauan langsung (*observation*). Metode analisis penelitian ini adalah metode analisa deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prosedur Integrasi Sistem Akuntansi tingkat Unit Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA) ke dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Dalam tingkat satuan kerja, yakni Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor yang berada di bawah Kementerian Perindustrian R.I akan melaporkan laporan keuangan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) yaitu Balai Besar Keramik Bandung, dari tingkat wilayah (UAPPA-W) akan melaporkan kembali ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yaitu Biro Keuangan Eselon I, dan yang terakhir dari tingkat Eselon I (UAPPA-EI) akan melaporkan ke tingkat Kementerian Negara/Lembaga yaitu Kementerian Perindustrian R.I. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1
Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Jenis dan Periode Pelaporan

Jenis laporan yang wajib disampaikan dari tingkat UAKPA sampai ke Ditjen PBN adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan dengan periode sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis dan Periode Pelaporan
Tingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1

No.	Jenis/Laporan/ADK	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1	LRA*)	X	X	X	X
2	Neraca	X		X	X
3	CALK			X	X
4	ADK	X			

Tabel 2
Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-E1

No.	Jenis/Laporan/ADK	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1	LRA*)	X	X	X	X
2	Neraca	X		X	X
3	CALK			X	X
4	ADK	X			

Tabel 3
Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPA

No.	Jenis/Laporan/ADK	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1	LRA*)	X	X	X	X
2	Neraca	X		X	X
3	CALK			X	X
4	ADK	X			

Tabel 4
Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPA ke Ditjen PBN

No.	Jenis/Laporan/ADK	Periode Pelaporan			
		Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
1	LRA		X	X	X
2	Neraca			X	X
3	CALK			X	X
4	Neraca Percobaan				X
5	ADK		X	X	

X = Jenis Laporan /ADK yang disampaikan

*) = LRA yang disampaikan meliputi LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA pengembalian Pendapatan.

Keterangan:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan atau data lainnya yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui e-mail.

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Dalam hal waktu penyampaian laporan keuangan Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (SMAKBO) sesuai dengan Perdirjen No.PER-36/PB/2009, batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi adalah tanggal 7 setiap bulannya ke KPPN Bogor dan Balai Besar Keramik Bandung. Pada saat semester SMAKBO menyampaikan laporan keuangan setiap tanggal 7 Juli.

Dalam peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 21/M-IND/PER/5/2006. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Perindustrian disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I selambat-lambatnya pada *tanggal 12 Agustus*.
- Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan disampaikan selambat-lambatnya pada *tanggal 17 Pebruari*.
- Untuk memenuhi target penyampaian laporan keuangan di atas, disampaikan jadwal pengiriman laporan dari tingkat Satuan Kerja (UAKPA) sampai dengan tingkat Kementerian (UAPA).

Prosedur Pelaksanaan Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA) dalam hal ini (SMAKBO) ke Tingkat Wilayah yaitu Balai Besar Keramik Bandung

Di dalam tingkat satuan kerja, dalam hal ini adalah Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor yang berada di bawah Kementerian Perindustrian R.I melakukan kegiatan seperti yang ada di bawah ini.

Tabel 5
Kegiatan Sistem Akuntansi Keuangan di SMAKBO

126

Kegiatan :	SAK Pada SMAKBO (Prosedur)			
	Harian	Bulanan	Semesteran	Tahunan
Merekam dokumen. Sumber: DIPA/SPM/SP2D/dll	√			
Mencetak Register Transaksi Harian	√			
Terima ADK BMN dari Sistem Akuntansi Pengguna Barang (SAKPB) dan Posting data transaksi yang valid.	√			
Cetak dan verifikasi buku besar	√			
Cetak LRA dan Neraca, kirim bersama ADK ke KPPN Bogor		√		
Rekonsiliasi dengan KPPN Bogor, buat BAR, perbaiki laporan bila perlu.		√		
Cetak neraca dan LRA, kirim bersama ADK ke UAPPA-W (Balai Besar Keramik Bandung)/UAPPA-E1(Biro Keuangan E1)		√		
Rekam dok piutang, persediaan dan Kontruksi dalam pengerjaan.				√
Menyusun CaLK kirim bersama LK (Lap. Keuangan) ke UAPPA-W (Balai Besar Keramik Bandung)/UAPPA-E1 (Biro Keuangan E1)			√	√

Keterangan:

BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) adalah Berita yang berisi tentang proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Prosedur Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yaitu Balai Besar Keramik Bandung ke Biro Keuangan Eselon I

Sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (PPAW), UAPPAW melaksanakan sistem akuntansi keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat wilayah yang merupakan gabungan laporan keuangan satuan kerja di bawahnya yang menggunakan dana APBN. Input akuntansi pada tingkat UAPPA-W yaitu Balai Besar Keramik Bandung adalah laporan keuangan dan arsip data komputer (ADK) yang diterima dari UAKPA yaitu Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor.

PENUTUP**Simpulan**

Sistem Akuntansi Instansi merupakan hal penting dalam menyusun laporan keuangan suatu instansi pemerintah. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambil keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara tepat waktu dan andal.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan:

- 1) Sumber daya manusia yang ada di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (SMAKBO) khususnya didalam melaksanakan atau menjalankan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) khususnya Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA) sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari sarana prasarana yang ada dan sudah diikutkannya operator dalam mengikuti pelatihan PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah), Namun masih kurang dalam hal operator karena dari 3 hanya 1 saja yang baru mengikuti pelatihan PPAKP.
- 2) Prosedur pelaksanaan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA) di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor yang berada di bawah Kementerian

Perindustrian R.I., sumber dana yang diperoleh berasal dari APBN (Anggaran Belanja Milik Negara) yang terdiri dari Rupiah Murni dan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berupa uang pendidikan. Proses SAI dimulai dari proses SPM menjadi SP2D. Selanjutnya data transaksi tersebut diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Sehingga menghasilkan laporan keuangan, laporan keuangan beserta Arsip Data Komputer (ADK) dikirim di KPPN. Laporan keuangan beserta ADK hasil rekonsiliasi setiap bulan dikirim ke Balai Besar Keramik Bandung (UAPPA-W) untuk dilakukan penggabungan.

- 3) Prosedur integritas Sistem Akuntansi tingkat Unit Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA) dalam hal ini SMAKBO akan melaporkan pada KPPN Bogor dan Balai Besar Keramik Bandung (UAPPA-W). Laporan keuangan di Balai Besar Keramik Bandung merupakan penggabungan laporan keuangan tingkat satuan kerja (UAKPA). Laporan keuangan tingkat wilayah setiap triwulan harus dikirim ke Kanwil Ditjen PBN. Laporan keuangan tingkat wilayah disampaikan ke Biro Keuangan-Eselon I (UAPPA-E1) setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan keuangan tingkat eselon I merupakan hasil penggabungan dari laporan tingkat wilayah. UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen PBN *cq*. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dan Laporan keuangan tingkat eselon I disampaikan ke Kementerian Perindustrian (UAPA) setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan keuangan di tingkat Kementerian merupakan hasil penggabungan dari laporan tingkat eselon I. di lingkungan Kementerian bersangkutan melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen PBN *cq* Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap akhir semester.

Saran

Beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal sumber daya manusia di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor diharapkan dapat menambah petugas komputer atau operator yang menjalankan/melaksanakan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan juga petugas yang ada sebaiknya diikuti melalui penyertaan pegawai dalam pelatihan yang berkaitan dengan penerapan SAI seperti PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah).
2. Di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor selalu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sehingga perlu untuk dipertahankan.
3. Selain itu proses akuntansi instansi dalam penyusunan laporan keuangan yang ada di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor sudah berjalan dengan baik sehingga perlu untuk dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H and William Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Alih Bahasa: Deddy Jacobus. Indeks, Jakarta.
- Chusing, Barry E and Marshall Romney. 2000. *Accounting Information System*. Wesley Publishing Company, New York.
- Gade, Muhammad. 2000. *Akuntansi Pemerintah*. Edisi 2000. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., Jakarta
- Iriyadi, Hastoni. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan (STIEK), Bogor.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Salemba Empat, Jakarta.
- Kusdaryanto, Eko dan Tri Widiyono. 2007. *Modul Sistem Akuntansi Keuangan*. Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sundjaya, Ridwan S & Inge Barlian. 2002. *Manajemen Keuangan I*. Salemba Empat, Jakarta.

Accounting Internal System Wilkinson, Joseph W. 2004. *Accounting and Information System*. Wiley Sons Inc, New Jersey.

Peraturan Menteri Perindustrian No.21/M-IND/PER/5/2006 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Departemen Perindustrian RI*.

Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.05/2007 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.

128

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 tentang *Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian*.

Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian No. 10/SJ-IND/PER/12/2007 tentang *Pedoman Pencairan dan Pertanggungjawaban Anggaran (DIPA) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2008*.